

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya kerjasama dipengaruhi oleh Globalisasi yang dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses yang menghubungkan masyarakat secara internasional. Hubungan yang dimaksud adalah suatu kejadian di suatu negara dapat mempengaruhi negara lain. Lalu globalisasi berkembang diiringi dengan pengaruh negara dan teknologi. Itulah sebabnya globalisasi bisa dikatakan sebagai salah satu aspek yang menstimulus perkembangan dunia di berbagai bidang. Perkembangan studi hubungan internasional juga dipengaruhi dengan adanya globalisasi yang menimbulkan banyak inovasi dan interaksi (John Baylis, 2017).

Penyebabnya adalah adanya peningkatan interdependensi yang berujung kepada kerjasama secara ekonomi antar aktor yang bersifat global. Keberadaan hubungan saling membutuhkan dapat menuju kepada perkembangan ekonomi politik internasional yang dapat membangun kerjasama antara aktor dengan lebih baik. Globalisasi ekonomi menyebabkan suatu negara menjadi relatif lebih terbuka terhadap perdagangan yang sifatnya internasional. Selain itu negara-negara yang terlibat dapat saling mempengaruhi akibat adanya hubungan ekonomi (Michael P. Todaro, 2015).

Globalisasi dapat menunjang kehadiran kerjasama ekonomi internasional dengan baik. Alasannya adalah globalisasi membuat batas negara menjadi kabur, maka dari itu kerjasama untuk membangun perekonomian negara menjadi lebih mudah untuk terealisasikan (John Baylis, 2017). Negara tentu saja memiliki sejumlah kebijakan luar negeri perihal berbagai isu yang dianggap penting dan tingkatan prioritas yang berbeda. Kebijakan luar negeri biasanya dilakukan oleh suatu negara sesuai dengan urgensi dan kepentingan yang dimiliki pada saat itu. Salah satu jenis kebijakan luar negeri dapat berbentuk penanaman modal di negara lain atau kerjasama di bidang ekonomi (Robert H. Jackson, 2016).

Pada tahun 2013 Tiongkok mulai kebijakan luar negerinya yaitu BRI (*Belt and Road Initiative*) dalam upayanya untuk menjadi kekuatan ekonomi besar yang membutuhkan hubungan dengan negara lain. Hubungan antarnegara dapat dipengaruhi dengan berbagai macam faktor, salah satunya keadaan ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dipengaruhi dengan adanya globalisasi ekonomi dan kondisi ekonomi politik internasional yang saling berhubungan. selama 10 tahun terakhir dari 2013-2023, Mesir yang sebelumnya merupakan mitra tradisional AS dan Tiongkok yang merupakan pesaing strategis Amerika telah menjalin hubungan yang semakin dalam. Selama waktu itu, Beijing telah berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan Mesir untuk memajukan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), sementara Kairo memandang Tiongkok sebagai mitra penting dalam revitalisasi ekonomi Mesir. Terikat bersama

oleh kepentingan ekonomi bersama, Mesir dan Tiongkok meningkatkan hubungan bilateral pada 2014 menjadi kemitraan strategis yang komprehensif (Xinhua, 2014).

BRI adalah rancangan kerja sistematis yang diusungkan oleh Pemerintah Tiongkok demi meningkatkan hubungan baik antara Benua Asia, Afrika dan Eropa. (TiongkokMinistry of Foreign Affairs, 2015) BRI terdiri dari dua jenis jalur yaitu SREB (*Silk Road Economic Belt*) dan MSR (*21st Century Maritime Silk Road*). SREB merupakan jalur darat yang menghubungkan beberapa negara menggunakan jalur darat, sedangkan MSR merupakan jalur laut yang menghubungkan Tiongkok dengan negara lain menggunakan jalur laut (Geethanjali Nataraj, 2015).

Konektivitas dalam BRI yang dibangun mengarah kepada pembangunan dan penguatan mitra Tiongkok dengan negara yang dilalui dua rute utama tersebut. Kemudian BRI juga memberi kemungkinan bagi Tiongkok untuk memperluas dan memperdalam keterbukaannya dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan (*China Ministry of Foreign Affairs, 2015*). Salah satu negara yang dijadikan sebagai negara mitraprogram BRI adalah Mesir. Pemilihan ini didasari dengan hubungan baik yang dimiliki Tiongkok dan Mesir. Tiongkok juga berpendapat bahwa kerjasama dengan Mesir dalam berbagai aspek perlu ditingkatkan (El-Said, 2018).

Pada Juni 2014, naiknya Menteri Pertahanan Sisi sebagai presiden, kemudian Setelah Sisi berkuasa, dia mengabdikan dirinya untuk memulihkan stabilitas nasional dan merevitalisasi ekonomi, dan memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi dan

rencana pembangunan, seperti proyek pengembangan koridor Terusan Suez, pembangunan ibu kota baru dan proyek zona pengembangan segitiga emas di Mesir dan sebagainya. Setelah lebih dari dua tahun persiapan pada February 2016, pemerintah Mesir secara resmi meluncurkan strategi pembangunan berkelanjutan “*Egypt Vision 2030*” yang didalamnya terdapat lebih dari 70 proyek dalam rencana visi, Visi tersebut bertujuan untuk menempatkan Mesir di peringkat 30 negara teratas di dunia dalam hal ekonomi (berdasarkan PDB), daya saing pasar, pembangunan sumber daya manusia, kualitas hidup dan anti korupsi pada tahun 2030 (mped.gov.eg, 2016).

Kedua belah pihak harus memberikan perhatian penuh untuk kerjasama antara keduanya termasuk kunjungan tingkat tinggi, dengan memberikan dukungan kuat untuk masing-masing kepentingan dan terus-menerus memperkaya konotasi strategis dua pihak harus mensinergikan strategi dan visi pembangunan mereka, dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur dan kapasitas produksi untuk membuat Mesir menjadi negara pendukung “*Belt and Road*” (Cinanews 2016).

Pada Januari 2016, Presiden Xi Jinping mengunjungi Mesir, yang merupakan kunjungan pertama ke Mesir oleh seorang pemimpin Tiongkok setelah 12 tahun Presiden kedua negara bertemu kembali untuk mencapai Pelaksanaan Lima Tahun Program Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Arab Mesir pada Memperkuat Strategi Komprehensif Kemitraan antara Kedua Negara mencoba atas dasar pembentukan kemitraan strategis yang komprehensif dalam 2014, dan membuat rencana rinci dan program untuk pengembangan dan kerjasama hubungan Cina-Mesir

untuk lima tahun berikutnya tahun 2016-2021, yang mencakup 80 bentuk kerjasama dari 10 proyek yang melibatkan politik, ekonomi dan perdagangan, militer dan keamanan, energi dan sebagainya (Cinaneews 2016).

Kedua negara juga menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Mesir tentang Bersama Mempromosikan *Belt and road* untuk menjadi jalur Ekonomi dan Pasar Abad ke-21 dengan sejumlah dokumen tentang kerja sama bilateral di bidang kelistrikan, pembangunan infrastruktur, ekonomi dan perdagangan, energi, keuangan, aeronautika dan astronotika, budaya, berita, teknologi, dan perubahan iklim (Kementerian PPN, 2016).

Presiden Sisi dan Xi Jin Ping satu sama lain sudah menjadi mitra yang ingin membangun hubungan bilateral yang memenuhi ambisi mereka yang tinggi untuk Mesir dan Tiongkok. menuju pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Ditandai dengan Presiden kedua negara bersama-sama meresmikan yang kedua Ekonomi Suez Tiongkok-Mesir kunjungan lebih lanjut mengkonsolidasikan strategi komprehensif kemitraan kedua negara dan memenuhi mensinergikan *BRI* dan strategi pembangunan Mesir yang kemudian strategi pembangunan mesir ini ditujukan untuk mencapai *Egypt Vision 2030* (chinaneews, 2016).

Namun banyak yang memandang bahwa kerjasama dengan Tiongkok ini memiliki resiko yang besar seperti yang terjadi pada Sri Lanka yang mengalami krisis pada 2019 dan bangkrut pada tahun 2022 yang diyakini disebabkan setelah melakukan kerjasama dengan Tiongkok yang membuat Sri lanka memiliki hutang yang berlebih

terhadap Tiongkok atau sering disebut dengan *debt trap diplomacy* (Acker, 2020). Pemerintah Tiongkok melakukan negosiasi rahasia dan non-kompetitif penetapan harga pada proyek-proyek dengan penawaran dan kontrak harus diberikan kepada perusahaan milik negara atau perusahaan Tiongkok yang membebankan harga di atas rata-rata (Brautigam, 2020).

Pada tahun 2018, The Guardian melaporkan bahwa beberapa negara yang bergabung dalam BRI telah mulai mempertimbangkan kembali proyek kerjasama BRI Tiongkok, seperti Malaysia dan Pakistan ada lebih banyak proyek merupakan sarana bagi China untuk membentuk kembali infrastruktur jalur perdagangan Tiongkok yang menggambarkan bahwa BRI merupakan kepentingan geostrategis Tiongkok (Lily Kuo, 2020). melatarbelakangi penulis untuk menjawab bahwa kerjasama Tiongkok - Mesir adalah kerjasama yang murni dan saling menguntungkan dengan memberikan kontribusi yang diberikan kedua negara yang sesuai dengan tujuan kerjasama.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan kunci: **“Bagaimana kontribusi kerjasama *Belt Road Initiative* (BRI) terhadap pencapaian *EGYPT VISION 2030* tahun 2014-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi BRI terhadap pencapaian *Egypt Vision 2030* tahun 2014-2022 melalui kerjasama BRI (*Belt And Road Initiative*) Tiongkok – Mesir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi para peneliti Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya terkait kontribusi BRI terhadap pencapaian *Egypt Vision 2030* tahun 2014-2022.

1.4.2 Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan, pemikiran dan memberikan teori-teori, konsep konsep terhadap studi Hubungan Internasional, serta sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan bagi

pihak lain yang ingin memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional terkait dengan kontribusi BRI terhadap pencapaian *Egypt Vision 2030* tahun 2014-2022.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 State of the art

Penelitian Chaziza tahun 2016 yang berjudul “*COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP: A NEW STAGE IN CINA-EGYPT RELATIONS*”. Penelitian ini mengatakan bahwa kerjasama antara Tiongkok-Mesir merupakan salah satu kerjasama bilateral yang termasuk penting. Alasan utama dalam hubungan yang terus berkembang ini adalah faktor ekonomi. Namun ada juga faktor pendukung lainnya yang membuat Tiongkok terus menguatkan hubungan kerja samanya dengan Mesir yaitu karena letak geografis dan ukuran pasar ekonomi dari Mesir. Maka dari itu Tiongkok terus mempertahankan hubungannya dengan Mesir melihat Mesir adalah mitra potensial untuk dapat membantu menjalankan strategi ekonomi Tiongkok (Mordechai Chaziza, 2016).

Penelitian Zhao pada tahun 2019, *The Multiple Roles of Egypt in Cina's 'Belt and Road' Initiative* membahas tentang perubahan yang telah terjadi dalam diplomasi Mesir, berfokus pada konsep inti dari strategi diplomatik Mesir terhadap Tiongkok dan berfokus sesuai dengan *'Belt and Road' Initiative* (BRI) Tiongkok. melihat aspek Mesir yang memiliki banyak fitur penting: lokasi geografis unik yang menjadikan Mesir sebagai titik pertemuan Dunia Arab, Afrika, Asia, dan Eropa melalui Laut Mediterania dan Laut Merah; peradaban dan budaya yang unik, dengan sejarah dan interaksi yang sudah berlangsung lama selama ribuan tahun dengan kerajaan Yunani, Persia, Roma, Turki, dan banyak lagi. Mesir juga dianggap sebagai titik pertemuan Islam dan Kristen, memiliki tatanan politik dan sosial yang relatif stabil, dan sistem ekonomi yang lengkap. Semua fitur ini membantu Mesir menjangkau global; memberikan kontribusi nilai yang besar bagi BRI Tiongkok dan memungkinkan Mesir untuk memainkan peran

kunci di dunia dengan Tiongkok sebagai mitra strategis. Tulisan ini juga menganalisis karakteristik diplomasi baru Mesir dan bagaimana mereka meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan hubungan Tiongkok-Mesir. Visi strategis antara Mesir dan Tiongkok tidak terbatas pada perdagangan dan investasi, namun juga keadaan regional dan global, seperti konflik Palestina-Israel, tata kelola keamanan Timur Tengah, pertahanan nasional, dan kontraterorisme (Zhao, 2019).

Hubungan diplomatik Tiongkok-Mesir terjalin pada Mei 1956. Pada tahun 2013, Tiongkok meluncurkan “*Belt and Road Initiative*” (BRI) dan mengundang negara-negara, terutama yang berada di sepanjang rute untuk berkontribusi dalam kerangka proyek tersebut. Presiden Mesir Sisi mengunjungi Tiongkok pada tahun 2014, dan kedua negara sepakat untuk mempromosikan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Pada tahun 2016, Mesir meluncurkan strategi baru pembangunan nasional “*Egypt Vision 2030*”. Oleh karena itu, kedua negara bekerja sama menurut kedua pesawat tersebut. Tulisan ini menganalisis hubungan Tiongkok-Mesir dalam konteks BRI. Ketika Inisiatif diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 2013, Mesir adalah salah satu negara pertama yang bergabung. Hubungan Sino-Mesir telah berkembang secara signifikan sejak awal 2010-an. Makalah ini menyoroti kerja sama di bidang bilateral, terutama dalam kerangka Belt and Road Initiative yang diluncurkan oleh Tiongkok. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana Mesir dan Tiongkok saling memperkuat dalam upaya bersama mereka untuk pembangunan ekonomi (Allauddin, 2021).

Perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada Kontribusi BRI pada *Egypt Vision 2030* tahun 2014-2022.

1.5.2 Neoliberalisme

Penelitian ini menggunakan Neoliberalisme untuk menganalisis fenomena kerjasama BRI Tiongkok mesir yang dibahas secara komprehensif. Pernyataan itu didukung dengan Neoliberalisme yang memiliki asumsi dasar bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor yang berperan dalam dunia internasional (Keohane, 2005). Walaupun negara adalah aktor utama, Perusahaan Multi Nasional dan Organisasi Nonpemerintah juga tidak kalah penting dalam menjalin suatu hubungan kerjasama internasional. Itu disebabkan oleh adanya keterkaitan di antara aktor negara dan non-negara. Perkembangan zaman juga menyebabkan terus bertambahnya aktor non-negara, bahkan saat ini jumlah aktor non-negara lebih banyak dibandingkan dengan aktor negara (Manfred B. Steger, 2010).

Neoliberalisme beranggapan bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarki tetapi aktor non negara seperti Perusahaan Multinasional dan Organisasi Nonpemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan. Ini didukung dengan adanya keterkaitan di antara aktor non negara dan negara. Pandangan ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah aktor non negara. Selain itu, aktor non negara juga dewasa ini jumlahnya melebihi aktor negara. Maka dari itu keadaan ini mendukung adanya kooperasi antar aktor semakin meningkat.

Neoliberalisme muncul untuk mengisi kekosongan dan hadir sebagai kritik dari Neorealisme yang fokus terhadap power-politics. Isu utama Neoliberalisme adalah *economy, dominant state, non-state actors, dan human right* (John Baylis, 2017).

Neoliberalisme juga menitikberatkan pada konsep rasionalitas dan kerjasama ekonomi. Kemunculan organisasi internasional yang dapat dijadikan wadah untuk bekerjasama dapat dijadikan sebagai dukungan untuk melakukan kerjasama dengan lebih baik. Kerjasama yang didasari oleh faktor ekonomi juga dapat menimbulkan sifat interdependensi yang dapat menuju terhadap dunia yang minim terjadinya konflik (Martin, 2007).

Selain itu integrasi serta kerjasama internasional dapat mudah terlaksana karena kerjasama secara ekonomi idealnya menimbulkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Kapabilitas suatu negara juga tidak dapat ditingkatkan melihat adanya interdependensi antarnegara yang kompleks sehingga tidak mudah untuk melakukan sesuatu karena adanya keterikatan. Kemudian kerjasama yang berlandaskan atas dasar ekonomi sering kali termasuk kepada kebijakan luar negeri suatu negara. Neoliberalisme beranggapan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara terutama dalam segi ekonomi menekankan kebaikan bersama (Baldwin, 1994).

Ada empat prinsip dasar yang dimiliki oleh Neoliberalisme, asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai kerangka berpikir Neoliberalisme. Pertama, negara merupakan aktor utama tapi bukan aktor tunggal dalam hubungan internasional yang cenderung untuk memaksimalkan kepentingannya. Kedua, negara berusaha untuk mencapai keuntungan maksimal dari kerjasama yang terjalin melalui kesepakatan dan terkadang mengesampingkan keuntungan negara lain. Ketiga, hambatan utama terhadap keberhasilan kerjasama adalah kelalaian atau kecurangan dalam suatu

perjanjian. Maka dari itu kehadiran organisasi internasional memiliki peranan yang relatif penting untuk menjaga keberlangsungan suatu perjanjian. Keempat, tidak dipungkiri bahwa dalam keberlangsungan kerjasama dapat memiliki masalah. Itu sebabnya negara memberikan kepercayaannya kepada suatu institusi yang memberikan keuntungan demi mempertahankan kepentingan nasionalnya pada level internasional (John Baylis, 2017).

Neoliberalisme menggunakan kerjasama internasional untuk mencapai keuntungan yang absolut atau *absolute gains*. Kaum neoliberalis tidak memperhatikan terlalu jauh mengenai keuntungan relatif dan menganggap semua pihak akan mendapatkan kelebihan dari keuntungan absolut, berbeda dengan kaum neorealis yang berpandangan bahwa negara harus memperhatikan betul keuntungan relatif dan keuntungan absolut (Lamy, 2001). Neoliberalisme percaya bahwa kerja sama internasional merupakan sebuah solusi utama atas sistem anarki (Baldwin, 1993).

Neoliberalis percaya bahwa dengan adanya sektor dan rezim yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian dapat mempengaruhi atau menjawab sebagian besar kepentingan negara sehingga bila kepentingan negara telah tercapai maka munculnya konflik dapat dihindarkan (Steans dan Pettiford, 2005). Kaum neoliberalis yang mempercayai adanya *absolute gains* yang memandang bahwa dengan keuntungan yang dibagi rata dalam kerja sama internasional, setiap pihak yang berkontribusi dalam kerja sama tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan yang absolut baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Baldwin, 1993).

Baik neorealisme dan neoliberalisme memandang bahwa keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi merupakan hal terpenting dalam tujuan negara. membangun model dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara penekanan neoliberal pada kesejahteraan ekonomi dan neorealis penekanan keamanan. Negara diasumsikan mencoba untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka di dunia yang mana kekuatan militer adalah suatu kemungkinan. Untuk sebagian besar, neorealists atau neoliberal memperlakukan tujuan negara dengan asumsi (Powell, 1994).

1.5.3 Konsep Kerjasama Ekonomi

Konsep kerjasama ekonomi internasional juga digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fenomena yang dilampirkan pada penelitian nanti. Kerjasama ekonomi internasional dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kesepakatan untuk menggunakan sumber daya teknologi dari masing-masing mitra. Kerjasama ekonomi internasional juga dapat diartikan sebagai kolaborasi antara dua aktor, negara maupun non-negara, atau lebih demi mencapai suatu tujuan tertentu (Ciprian, 2015). Konsep ini mendukung analisis dalam bagian bagaimana kerjasama yang diinisiasi oleh Tiongkok dalam program BRI sebagai kebijakan luar negerinya terhadap Mesir.

Kerjasama juga terjalin di antara entitas kolektif yaitu perusahaan, partai politik, organisasi etnik, kelompok teroris dan negara-bangsa. Walaupun kerjasama internasional biasanya cakupannya adalah negara, tetapi tidak memungkiri adanya aktor lain yang terlibat seperti organisasi antarpemerintah dan organisasi non

pemerintah. Biasanya ranah organisasi antarpemerintah adalah dibidang permasalahan lingkungan yang bersifat global sementara organisasi non pemerintah ranahnya berada di kampanye peduli lingkungan. Setiap aktor yang terlibat dalam kerjasama internasional ini memiliki objektivitas yang berbeda sehingga akan menghasilkan bentuk strategi yang berbeda pula (Xinyuan Dai, 2017).

Negara Pada umumnya melakukan kerja sama saat kedua belah pihak berkeinginan untuk saling membantu dalam mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai bila dilakukan sendiri. Negara bekerjasama demi mencapai suatu tujuan melewati perdagangan. Perdagangan di sini diartikan sebagai sebuah konsep ekonomi yang sama pentingnya seperti hubungan politik antar negara, lalu perdagangan ini merupakan hasil dari negosiasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Akan tetapi perdagangan yang merupakan kerjasama ini juga memiliki arti sebagai memberikan sesuatu untuk mendapatkan hal lain sebagai imbalannya. Dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan salah satu bentuk tindakan timbal balik (John W. Best, 2006).

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Absolut gains

Neoliberal menjauh dari kerangka realis yang berpusat pada negara dan menganjurkan model aktor campuran yang mencakup organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, dan pemain non-negara lainnya. Mereka percaya bahwa agenda IR telah berkembang pesat di abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang

Dingin. Dengan demikian, keprihatinan komprehensif di luar dimensi militer dan diplomatik harus diperhitungkan. Konsekuensinya, mereka berkonsentrasi pada pengejaran keuntungan “*absolut*” daripada keuntungan “relatif” dalam interaksi internasional. Menurut neoliberal, negara bersifat individualistis atau "egois rasional", dan mendefinisikan kepentingan dalam hal keuntungan individu. Teori "keuntungan absolut" mengukur efek total, yang terdiri dari efek kekuatan, keamanan, ekonomi, dan budaya dari suatu tindakan. Neoliberalisme menyarankan bahwa semua negara dapat memperoleh keuntungan secara damai dan serentak berdasarkan keunggulan komparatif (Grieco, 1988).

1.6.2 Konsep Interdependensi

Definisi dari Interdependensi dalam hal ini yaitu ketergantungan timbal balik (Jackson & Saronsen, 2005). Pada tahun 1970an, Keohane dan Joseph Nye mengembangkan aliran Neoliberalisme Interdependensi. Keohane dan Joseph Nye melihat bahwa hubungan yang terjalin setelah perang antara negara-negara barat termasuk Jepang yang mana kemudian disebut sebagai negara dagang paling berhasil secara ekonomi pada saat itu, dicorakkan oleh apa yang disebut interdependensi kompleks. Terdapat banyak bentuk hubungan antar masyarakat pada hubungan politik pemerintah termasuk juga perusahaan transnasional. Selain itu, menurut Keohane dan Nye kekuatan militer sudah tidak digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Penganut teori Neoliberalisme percaya bahwa kebebasan individu khususnya dalam sektor ekonomi dapat membawa kesejahteraan manusia. Kebebasan individu yang

dimaksud adalah hak kepemilikan pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas. Ketika kebebasan diberikan kepada individu, kemudian peran Negara hanya sebagai penjamin dan penanggung jawab (Keohane, 2012).

1.7 Definisi Operasional

1.7.2. Konsep Absolut Gains

Dalam konsep absolut gains cenderung ditemukan dalam bentuk bentuk Kerjasama ekonomi, yang dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kesepakatan untuk menggunakan sumber daya teknologi dari masing-masing mitra. Kerjasama ekonomi internasional juga dapat diartikan sebagai kolaborasi antara dua aktor, negara maupun non-negara, atau lebih demi mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan (Ciprian, 2015). Dari konsep ini kemudian dapat digunakan untuk kerjasama ekonomi dalam penelitian ini yang terjalin antara Tiongkok dan Mesir.

1.7.3 Konsep Interpedensi

Dalam konsep interpedensi dalam penelitian ini Negara dalam membuat kebijakan luar negerinya dipengaruhi oleh kebijakan Negara lain yang saling bergantung seperti saling bergantungnya Tiongkok dan Mesir untuk mencapai tujuan BRI dan *Egypt Vision 2030*.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mencoba memberikan gambaran atas suatu fenomena atau subyek penelitian, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana BRI dapat berkontribusi dalam capaian *Egypt Vision 2030*.

1.8.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membantu menganalisis isu dan permasalahan yang terjadi seputar program BRI (*Belt Road and Initiative*) oleh Tiongkok di Mesir dan kontribusinya terhadap *Egypt Vision 2030*. Metode kualitatif dianggap sesuai untuk mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini karena hasil dari penelitian ini adalah analisis data yang menjelaskan suatu isu atau permasalahan pada kondisi tertentu. Selain itu metode kualitatif merupakan pendekatan yang sesuai digunakan untuk menganalisis makna suatu fenomena. Untuk dapat memperoleh pemahaman secara lebih mendalam diperlukannya dilakukan pengkajian data secara sistematis agar dapat meningkatkan pemahaman menjadi lebih komprehensif terkait suatu fenomena (Cresswell, 2014). Metode kualitatif cocok dijadikan instrumen pembantu dalam menganalisis data yang dilampirkan dalam karya ilmiah ini karena dapat menjelaskan data untuk riset yang dilakukan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literature merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Literature ini dapat berupa kasus suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program pengumpulan data dalam karya ilmiah ini berupa Studi literatur. Studi literatur yang dilakukan ditujukan untuk mengakumulasi serta mempelajari informasi dan penelitian yang relevan untuk mendukung analisis yang dilakukan dalam karya ilmiah ini. Studi literatur yang dilakukan adalah untuk membuat analisis yang dilakukan dalam karya ilmiah menjadi akurat (Creswell, 2016). Adapun literatur yang dimaksud adalah dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, skripsi, dan artikel yang berasal dari media online.